

Konstruksi Komunikasi Internasional

Nanang Trenggono

ABSTRAK

Komunikasi internasional adalah spesialisasi ilmu komunikasi yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, fenomena yang menjadi pembahasan dominan sarjana komunikasi, yaitu media internasional. Kedua, fenomena yang meliputi komunikasi politik internasional, hubungan internasional, dan hubungan antarbudaya. Dua kategori studi ini dipadukan sebagai fokus kajian komunikasi internasional sebagai implikasi dari revolusi teknologi informasi-komunikasi global, sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian komunikasi internasional (international communication) memiliki dimensi-dimensi komunikasi politik internasional (international political communication), hubungan internasional (international relations) dan hubungan antarbudaya (intercultural relations). Sesuai dengan tahap perkembangannya, ada dua perspektif pokok dalam studi komunikasi internasional, yakni (1) perspektif sistem dan filsafat, dan (2) perspektif transmisional atau arus informasi global yang memunculkan perdebatan antara pandangan dominasi media Barat dalam informasi-komunikasi global versus kontribusi media Barat dalam keseimbangan informasi-komunikasi global.

1. Pendahuluan

Komunikasi internasional merupakan salah satu bidang, arena dan konteks dalam ilmu komunikasi. Fenomena komunikasi internasional sangat luas, sehingga ada semacam tuntutan untuk membuat batasan. Setidaknya bila merambah ranah disiplin ilmu lain tetapi bisa diperlihatkan sisi-sisi perbedaannya sebagai bagian dari ilmu komunikasi.

Meskipun sudah diusahakan untuk membatasi, bisa saja tetap terjadi tumpang tindih dengan aspek-aspek disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, penelusuran studi komunikasi internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, fenomena arus informasi-komunikasi global yang menjadi pembahasan dominan sarjana komunikasi, yaitu media internasional (Asante & Gudykunst, 1989). *Kedua*, fenomena-fenomena yang meliputi komunikasi politik internasional, hubungan internasional, dan hubungan antarbudaya (Sastropetro, 1991).

Ilmu komunikasi sebagai disiplin yang relatif muda sering dianggap selintas oleh berbagai

sarjana dari disiplin ilmu lain yang lebih tua seperti psikologi dan sosiologi. Oleh karena itu, bagi para sarjana yang menggeluti ilmu komunikasi memiliki tanggungjawab moral untuk membangun kemandirian ilmu komunikasi. Namun, banyak sarjana yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas keilmuan ini. Selain itu, ilmu komunikasi bukan *recycle bin* (keranjang sampah) dari ilmu alam dan sosial. Posisi ilmu komunikasi sama dengan ilmu lain yang memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi keilmuan serta merupakan disiplin yang mandiri, otonom dan sederajat dengan ilmu-ilmu lain. Perkembangan ilmu komunikasi, termasuk topik komunikasi internasional, tergantung pada fenomena kehidupan manusia yang semakin mengglobal dan kesatuan pemikiran para sarjana ilmu komunikasi sendiri.

Ilmu komunikasi bukan pula bersifat seperti *bunglon*, yang selalu berubah warna di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan warna tempat yang ditinggalinya. Oleh karenanya, para sarjana ilmu komunikasi boleh saja menggabungkan ilmu

komunikasi dengan ilmu sosial yang lain, seperti hukum, lingkungan, ekonomi, spiritual dan sebagainya. Namun, harus berangkat dari pemikiran dasar yang jelas argumentasinya. Bukan semata-mata pemikiran arbitrari. Penggabungan ilmu komunikasi dengan ilmu sosial atau gejala sosial yang lain harus konkret, mendasar, dan memperlihatkan perbedaan, termasuk kajian komunikasi internasional.

2. Posisi Pemikiran

Komunikasi sebagai disiplin ilmu, memiliki objek formal dan materi yang membedakannya dengan ilmu sosial lainnya (Winangsih-Syam, 2003). Selain itu, esensi objek formal, objek materi atau fokus kajian adalah menunjukkan karakter keilmuan (Siregar, 1996). Meskipun ilmu komunikasi memiliki fokus kajian yang membedakannya dengan ilmu sosial lainnya, perkembangan realitas manusia dan ilmu sosial sudah sedemikian rupa sehingga sulit mencari garis batas antarilmu. Bahkan, antara ilmu sosial dan eksak sudah banyak pertautan.

Sulit memperlihatkan batas antara sosiologi dan antropologi, komunikasi dengan psikologi dan psikologi sosial, atau psikologi sosial dengan sosiologi. Meskipun bisa dicari perbedaannya di antara ilmu-ilmu sosial, namun lebih bermanfaat menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan fenomena sosial, mengetahui proses perubahan sosial dan perkembangan teknologi modern. Sosiologi cenderung mengkaji komunitas masyarakat kuno, sementara antropologi mulai memasuki telaah masyarakat modern, sehingga melahirkan antropologi terapan. Seorang dokter perlu membekali diri dengan pemahaman dan praktik komunikasi. Seorang arsitektur perlu memahami sosiologi, antropologi dan ilmu sosial lain untuk menciptakan karya arsitekturnya (lihat Mulyana, 2002).

Ilmu komunikasi yang pada dasarnya bersifat interdisipliner, berkembang dari persimpangan berbagai keilmuan sosial dan alam, seperti matematika, fisika, biologi, psikologi, bahasa, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan

filsafat. Bahkan, perkembangan teknologi informasi-komunikasi yang semakin canggih, telah membawa implikasi semakin kabur batasan level-level dalam ilmu komunikasi, antara komunikasi antarpersona, kelompok, massa, dan publik. Oleh karena itu, meskipun penting, seringkali tidak banyak memberi manfaat untuk membedakan batas-batas, baik antarilmu sosial maupun internal ilmu komunikasi. Kita tidak perlu terbelenggu membedakan level-level komunikasi dalam melukiskan fenomena komunikasi yang berkembang cepat (Lull, 1998).

Berdasarkan fenomena komunikasi yang kompleks, maka perspektif teori lebih menunjukkan deskripsi yang tegas dalam ilmu komunikasi, sehingga perspektif yang berbeda akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang nyata (Mulyana, 2002). Secara terminologis, perspektif atau *point of view* merupakan seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan (Becker, 1968). Perspektif akan memandu persepsi (Charon, 1998).

Perspektif sering disebut paradigma, *school of thought*, tradisi, dan teori (Mulyana, 2002; Rosengren, 1983, 1989, 1991a). Perspektif juga diidentikkan dengan model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran atau *world view* (Mulyana, 2002). Biasanya, perspektif sebagai paradigma berpikir memiliki pengikut para sarjana atau intelektual yang selalu mempertahankan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan fenomena sosial.

Perspektif ilmu komunikasi berkembang terus. Empat perspektif yakni mekanistik, psikologis, interaksional, dan pragmatik (Fisher, 1978). Kemudian *covering law, rules*, sistem, mekanistik, psikologis, interaksionis dan pragmatis (Tucker, 1981). Selain itu, digunakan pendekatan psikologi; sosiologi; dan biososial (Stacks, 1991). Lalu, teori struktural dan fungsional, kognitif dan perilaku, interaksionis, interpretif dan kritis (Littlejohn, 1996). Berkembang lagi teori: feminis, hermeunetik, semiotik, Marxis, *interactionism interpretive*, dekonstruktivis, *psycho history, cultural studies, postmodernism, poststructuralism, postcolo-*

nialism, political economy, dan sebagainya (Bertaux, 1997). Yang mutakhir perspektif: *post-positivist, interpretive*, dan *critical* (Miller, 2002).

3. Pondasi Konseptual

Mulanya, komunikasi internasional merupakan spesialisasi dari komunikasi massa. Sebab komunikatornya adalah lembaga atau individu yang dilembagakan seperti presiden, perdana menteri atau raja, pemerintah, negara, atau organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan komunikasi yang sifatnya internasional.

Sebagian besar sarjana ilmu komunikasi, Uni Eropa, AS, dan Indonesia, mengkaji fenomena komunikasi internasional dalam tiga perkembangan. *Pertama*, studi awal yang didominasi dunia pers (media cetak), tetapi selanjutnya *concern* pada media *broadcasting* transnasional. *Kedua*, perkembangan populer yang terfokus pada pengaruh arus informasi-komunikasi global dan teknologi *software* pada kondisi domestik suatu negara, baik hukum, sosial, ekonomi maupun budaya, terutama identitas bangsa. *Ketiga*, masih berpusar pada kondisi kedua, kurang lebih dari dua dekade fokus studi tertuju pada Tatanan Informasi-Komunikasi Dunia Baru. Terutama perdebatan seputar terjadinya ketidakseimbangan arus informasi-komunikasi dari negara Utara (AS dan Uni Eropa) menuju negara Selatan, sebagai dampak dari ideologi *free flow of information and communication* yang disepakati PBB 1970-an (Soesanto, 1982; McPhail, 1989; Sastropetro, 1991; Dahlan, 2000; dan Muis, 2001).

Pada arus yang lain, fenomena komunikasi internasional dikaitkan dengan studi komunikasi politik internasional, hubungan internasional, dan hubungan antarbudaya (Sastropetro, 1991). Secara terminologi, komunikasi politik internasional (*international political communication*) lebih berkenaan dengan hubungan antarnegara *vis-à-vis*, yang terkait dengan konflik ekonomi, diplomatik, atau militer, di mana negara-negara yang berkonflik tidak hanya menggunakan kekuatan ekonomi dan militer, namun juga memanfaatkan kekuatan opini publik, seperti yang

terjadi pada Era Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika Serikat menggunakan media untuk saling menyerang dan membangun opini dunia (McNair, 1999).

Demikian pula dengan hubungan internasional (*international relations*), lebih menitikberatkan pada hubungan antarbangsa, pemerintah atau negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku, tidak ditekankan pada konflik antarnegara, namun pada hubungan antarnegara, bersifat formal dan ada *political will*. Pendekatannya mencakup pengertian negara dan kedaulatannya, sistem negara, kekuatan nasional dalam arti luas, politik nasional dan internasional. Dalam kegiatan hubungan secara internasional, digunakan komunikasi. Hal ini dapat dimengerti, tetapi tidak berarti bahwa hubungan internasional sama dan identik dengan komunikasi internasional. Dalam *Encyclopedia Americana* IX Vol. 15 Indian/Jeffer (hal. 315), bahwa hubungan internasional “memberikan arti tentang interaksi antarbangsa atau antarindividu dari bangsa yang berbeda-beda. Hubungan ini dapat bersifat politis, kultural, ekonomis atau militer. Dasar pemikirannya berhubungan erat dengan berbagai subjek politik internasional, diplomasi, komunikasi internasional, dan organisasi internasional” (Sastropetro, 1991).

Hubungan antarbudaya (*intercultural relations*) merupakan proses pertukaran pemikiran dan makna di antara orang-orang yang berbeda budaya. Hubungan antarkebudayaan dari bangsa satu dengan bangsa yang lain, yang menyangkut pada seni, etiket, tingkah laku dan sebagainya (Maletzke, 1989; bandingkan dengan Soesanto, 1982; Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, 2003). Bahwa dalam hubungan antarbudaya digunakan komunikasi, jelas, tetapi tidak berarti komunikasi antarbudaya adalah komunikasi internasional (Sastropetro, 1991).

Keseluruhan bidang-bidang kajian tersebut harus dimengerti sebagai basis untuk memahami komunikasi internasional (lihat Soesanto, 1982). Menurut Sastropetro (1991), “bahwa di antara tiga disiplin: komunikasi internasional, hubungan internasional dan hubungan antarbudaya serta satu lagi adalah komunikasi politik internasional,

terdapat saling persentuhan, adalah jelas, karena semuanya adalah disiplin ilmu yang diciptakan manusia dan tumbuh sebagai hasil karya manusia. Namun, masing-masing bisa berdiri sendiri, sebab adanya perbedaan-perbedaan teori, konsep, sistem, dan penerapan, oleh negara satu atau negara yang lain”.

Berdasarkan gambaran dan perkembangan teknologi informasi-komunikasi yang mengglobal, dapat disimpulkan bahwa bidang kajian komunikasi internasional (*international communication*) memiliki dimensi-dimensi, antara lain, komunikasi politik internasional (*international political communication*), hubungan internasional (*international relations*) dan hubungan antarbudaya (*intercultural relations*). Lihat Bagan 1.

Komunikasi internasional merupakan suatu proses komunikasi di antara negara atau bangsa melampaui batas-batasnya (Maletzke, 1989). Proses komunikasi internasional sesuai dengan perhatian para teoretisi dan peneliti, terutama pada Tatanan Informasi-Komunikasi Dunia Baru (*New World Information and Communication Order*) diletakkan pada kebebasan arus informasi-komunikasi secara internasional. Proses komunikasi internasional ini secara evolusi cenderung mencari kondisi yang lebih adil dan menuju keseimbangan di antara negara-negara dunia. Hak-hak nasional untuk menentukan arah kebijakan informasi-komunikasi secara domestik dihargai. Demikian pula pada level internasional, dalam hubungan antara negara-negara Utara dan Selatan, Barat, dan Timur, atau negara maju dan berkembang, suatu arus informasi dua arah mencerminkan akurasi aspirasi dan aktivitas negara berkembang. Bahkan, karena berbagai fenomena internasional yang sedang berjalan terus menerus, maka dikotomi Barat-Timur, Utara-Selatan, atau Maju-Berkembang mulai mengalami pergeseran memudar.

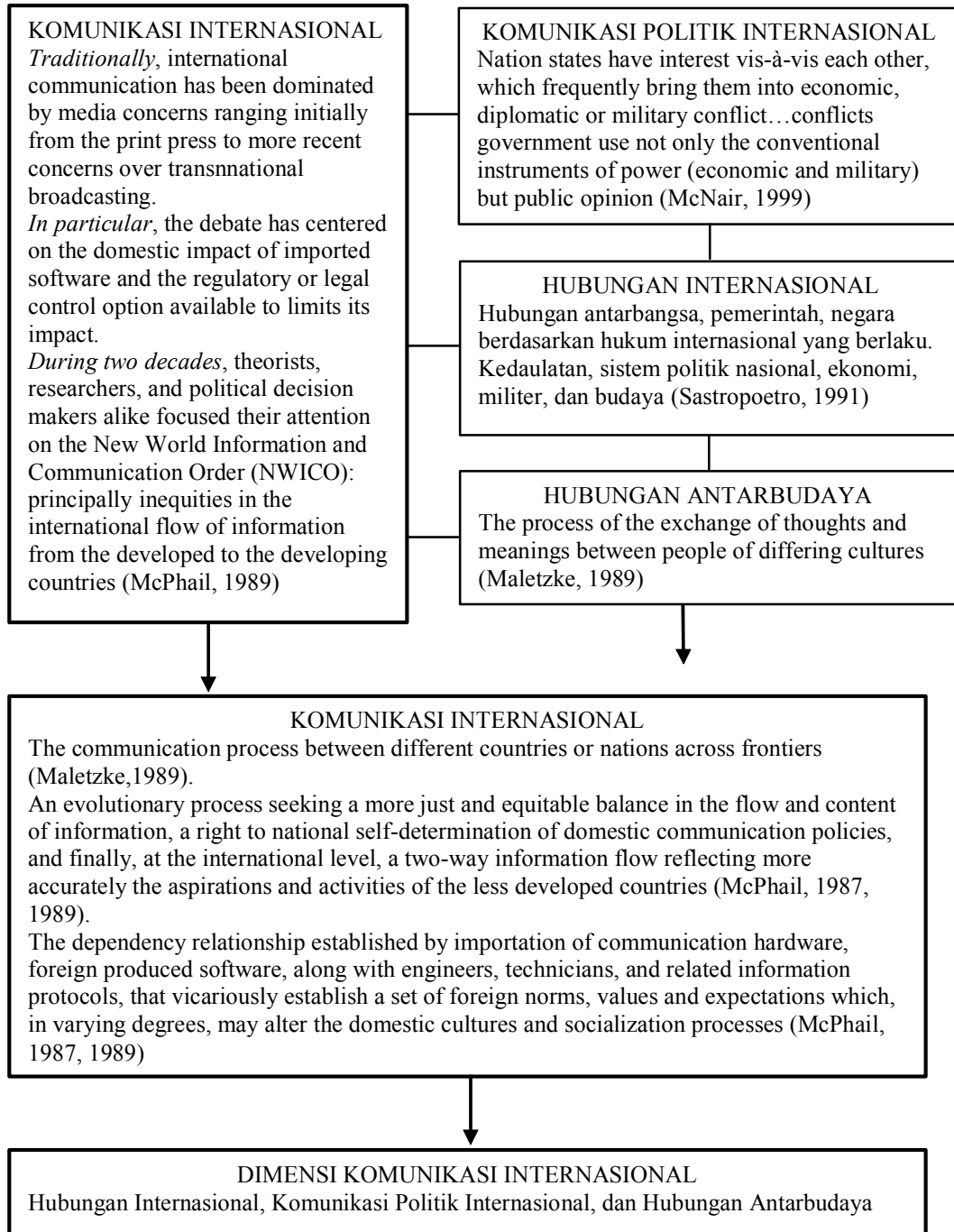
Seiring dengan perkembangan globalisasi, muncul kemajuan yang tidak terduga secara horisontal dan menyebar di belahan dunia ini. Misalnya, kerjasama India-Cina atau Inggris-Rusia. Perkembangan teknologi informasi-komunikasi telah menumbuhkan hubungan pertukaran *hardware*, *software*, *engineer* lintas negara, dan

protokol informasi yang terkait dengan teknologi tersebut. Hal ini membawa seperangkat norma, nilai, dan harapan baru dengan derajat yang berbeda-beda pengaruhnya. Akhirnya, bisa menjadi alternatif budaya dan proses sosialisasi domestik negara pengguna teknologi informasi-komunikasi. Apalagi setelah terjadi revolusi telekomunikasi. *Pertama*, ekspansi *satellite-delivered traffic* dalam berbagai tipe termasuk suara, video, dan data. *Kedua*, perkembangan canggih *Integrated Services Digital Network* (ISDN). Perkembangan cepat ini berarti menumbuhkan isu baru seperti *transborder data flows* (TDF), *direct broadcast satellites* (DBS), informatika, dan informasi ekonomi, yang akan mempengaruhi secara signifikan kajian komunikasi internasional.

Revolusi teknologi informasi-komunikasi juga membawa implikasi terjadinya paradoksal dalam kajian komunikasi internasional. Di satu sisi, inovasi teknologi yang bertumbuh mampu menciptakan infrastruktur global yang canggih secara teknikal. Melalui ISDN dapat diciptakan infrastruktur global seperti konsep televisi global, film global, dan sistem informasi dunia. Di sisi lain, inovasi teknologi juga telah “meruntuhkan” konsep dan konvensi khalayak massa. Paradoksal lain dari studi komunikasi internasional sebagai implikasi inovasi teknologi dapat diilustrasikan pada komunikasi media. Industri media cetak dengan teknologi *satellite delivery* mampu mengembangkan media secara nasional bahkan internasional, seperti *USA Today*, *the Wall Street Journal*, *Financial Times* atau *International Herald Tribune* yang mudah diperoleh di toko buku atau perpustakaan di Indonesia.

Di samping internasionalisasi media cetak, teknologi juga mampu merekayasa peluang secara terspesialisasi dan lokal. Banyak berbaran media cetak, majalah atau koran yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan khalayak tertentu di lokal wilayah tertentu. Terlebih lagi, perkembangan audio video, seperti *VCD*, *DVD*, televisi kabel, *home theatre*, alat informasi, dan data; semuanya dapat dinikmati secara individual. Perpaduan teknologi komputer dan komunikasi visual yang melahirkan berbagai tipe telepon genggam, kebutuhan cetak

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Komunikasi Internasional



gambar, alat komunikasi, alat penghitung dan data, sudah memasuki alam perdesaan di Indonesia.

Berdasarkan gambaran di atas dapat diuraikan lebih dalam mengenai komunikasi internasional berdasarkan perspektif, kajian, dan konteksnya, sesuai dengan perkembangannya. Ada dua perspektif pokok dalam kajian komunikasi internasional, yakni (1) perspektif sistem dan filsafat, dan (2) perspektif transmisional atau arus informasi global yang memunculkan perdebatan antara pandangan dominasi media Barat dalam informasi-komunikasi global *versus* kontribusi media Barat dalam keseimbangan informasi-komunikasi global.

4. Perspektif Sistem dan Filsafat

Mulanya, pemikiran sistemik menurut John C. Merrill menjadi cara pandang dalam komunikasi internasional (Malik, 1993). Perspektif sistem dipinjam dari disiplin ilmu biologi dengan dasar pemikiran bahwa setiap makhluk hidup merupakan

suatu sistem organisme yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki fungsi dan saling berhubungan satu sama lain untuk keberlanjutan hidup organisme tersebut. Perspektif biologi ini dianalogikan dalam realitas sosial, yakni sistem media massa (sistem pers). Fokus perspektif sistem terletak pada tindakan fungsional bagian-bagian dari sistem. Berdasarkan perspektif ini, media massa atau pers bisa dipandang sebagai sistem yang otonom dan memiliki tujuan, tetapi juga dipandang sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu negara.

Pemikiran tentang sistem pers negara sebenarnya juga merupakan telaah filsafat. Karena pertanyaan awal tentang pentingnya sistem pers, berupa pertanyaan filsafat tentang dimana dan sejauhmana batas kebebasan media dalam kaitannya dengan pengendalian oleh negara. Pertanyaan mendasar ini sejak awal studi hingga sekarang masih relevan diperdebatkan. Dalam praktik perdebatan tentang negara versus jurnalisme pers, terus menjadi wacana publik di berbagai

Bagan 2. Perspektif Sistem dan Filsafat

1. Perspektif	▪ Filsafat dan Sistem
2. Landasan	▪ Biologi (Analogi Organism) ▪ Filsafat (Malik, dkk, 1993)
3. Lokus/Fokus/Isu	▪ Tindakan Fungsional Sub-Sistem ▪ Batas Kebebasan vs Kontrol ▪ Government vs Jurnalis
4. Teori/Model/Proposisi	▪ Empat Teori Pers (1956) ▪ Model Lowenstein (1971) ▪ Political Press Circle(1974) ▪ Konsep Lima (1981) ▪ Tipologi Altschull(1984) ▪ Tipologi Picard(1985) ▪ Tipologi Head(1985) ▪ Tipologi McQuail(1989)
5. Objek Studi/Kajian/Konteks	▪ Benturan Ideologi Tipe Hatchten ▪ Perbandingan Sistem Media ▪ Sistem Berita Internasional ▪ Sistem Media dan Kebangsaan ▪ <i>The Passing of Traditional Society</i> , penelitian awal komunikasi internasional ▪ Istilah Komunikasi Internasional sebagai Disiplin Baru

belahan dunia, baik di negara ketiga maupun di negara maju (*lihat Bagan 2*).

Di Indonesia, kajian komunikasi internasional dalam perspektif sistem media lebih banyak dikaitkan dengan nilai kejuangan, pembangunan, nasionalisme, kebangsaan atau jati diri. Dalam perkembangannya, dikenal sistem *Pers Perjuangan, Pembangunan, dan Pancasila*. Objek kajian ini masih terus dilakukan sampai sekarang (Soesanto, 1982; Dahlan, 2000; Muis 2001).

Sejarah penelitian komunikasi internasional pertama adalah riset Daniel Lerner tentang *The Passing of Traditional Society* (1958) yang memunculkan perdebatan. Fokus penelitiannya pada komunikasi pembangunan yang menyimpulkan, bahwa modernisasi suatu masyarakat dipengaruhi oleh media massa dan mobilisasi masyarakat. Tetapi istilah komunikasi internasional, sudah ada sebelum diekspose dalam penelitian Lerner, ketika Leolowenthal mengumumkan komunikasi internasional sebagai disiplin baru dan dimuat dalam *Public Opinion Quarterly* (1952) yang dikeluarkan organisasi *American Association for Public Opinion Research* (AAPOR).

5. Perspektif Transmisional dan Perdebatannya

5.1 Dominasi Barat dalam Informasi-Komunikasi Global

Perspektif yang paling banyak dikaji oleh para teoretisi, peneliti, dan pembuat kebijakan, baik intelektual Barat maupun Timur, termasuk Indonesia, dalam komunikasi internasional adalah fenomena dominasi informasi-komunikasi global, terutama oleh AS dan negara Uni Eropa. Banyaknya kajian ini terkait dengan kondisi Perang Dingin, yakni hubungan negara Maju dan Berkembang tidak dalam kondisi keseimbangan, dan dikuasainya PBB oleh negara-negara besar (*lihat Bagan 3*).

Perspektif transmisional meletakkan media massa sebagai fokus yang tidak terlepas dari aspek teknologi sekaligus kebudayaan, karena yang

menciptakan dan menggunakan teknologi adalah manusia. Asumsi dasar perspektif transmisional adalah spirit *free flow of information and communication*, yang ujung-ujungnya mendorong proses globalisasi. Diduga ini menjadi bagian dari politik negara Utara, khususnya AS dan Uni Eropa, untuk mendominasi pemilikan dan kontrol arus informasi-komunikasi dunia. Problemanya, kondisi ketidakseimbangan ini membawa implikasi bagi dunia berkembang, terkait isu memudarnya identitas, etika, dan membawa implikasi hukum bagi aktivitas komunikasi internasional.

Dalam sejarahnya, globalisasi media dan informasi, berawal dari adanya pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Di sini, konsep *Freedom of Information* (dalam Sidang Majelis Umum PBB 10 Desember 1948 di Paris) ditegaskan sebagai bagian dari diktum HAM. Bahwa, kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi (*freedom of expression*) harus dapat dilaksanakan oleh setiap individu tanpa mendapatkan gangguan. Begitu pula gagasan untuk bebas mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, serta mencakup (mengakses) semua media (saluran) melewati batas-batas negara (*regardless of frontiers*). Inilah yang disebut *global village* (Naisbit & Aburdene, 1991). Kebebasan informasi, termasuk *freedom not to communicate* (kebebasan untuk tidak menerima informasi melalui media massa, bukan kebebasan untuk tidak berkomunikasi).

Kebebasan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hidup, membawa implikasi yang selayaknya, harus tersedia pilihan-pilihan dalam upaya untuk mencari, memperoleh dan membagi informasi (yang disebut dengan keadilan informasi), sebab pemerataan informasi tidak menjamin keadilan informasi. Oleh karena itu, paradigma komunikasi dalam globalisasi media dan informasi harus menjamin keadilan informasi. Arus informasi-komunikasi harus mendatar dan banyak arah. Kebebasan untuk mengelola sumber daya informasi-komunikasi tanpa pembatasan yang ketat.

Idealisasi konsep komunikasi internasional ini, pada periode 1970-1980, diformulasikan PBB dalam

Tata Komunikasi dan Informasi Dunia Baru (*New Economic Order*) harus dibarengi dengan *New World Information and Communication Order/ World Information and Communication Order/ NWICO*. Tetapi dalam perdebatan yang sengit di NWICO (Muis, 2001).

Bagan 3. The US Media Have an Unhealthy Dominance (Merill, *et al.*, 1991)

1. Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dominasi Barat dalam Komunikasi Global
2. Landasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matematika dan Ilmu-Ilmu Sosial ▪ Teknologi
3. Lokus/Fokus/Isu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran (Media, Teknologi, dan Budaya). ▪ Free Flow of Information & Communication. ▪ Globalisasi: Dominance Ownership and Control. ▪ Dampak Negatif: Identitas, Hukum, dan Etika.
4. Teori/Model/Proposisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Most international news flows from the Developed (the West/the North) to the Developing nations (the Third/the South);</i> ▪ <i>Proximity: physical, psychological, and political—is major factor in news coverage throughout the world;</i> ▪ <i>The United States and Western Europe receive the largest amount of coverage, followed by the socialist countries and the Third World;</i> ▪ <i>Vertical flow of international (North to South) is a dominant flow pattern of the world;</i> ▪ <i>It has resulted in “a massive consumer culture”, that erodes national identity in many parts of the worlds.</i>
5. Objek Studi/Kajian/ Konteks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Media dominan: <i>Reuter, VOA, CNN, BBC</i>, dsb. ▪ Keseragaman berita dan preferensi liputan yang sama. ▪ Interdependensi media antar negara: <i>CNN & RCTI</i>. ▪ Agenda media dan khalayak sama. ▪ Tipis batas komunikasi, hukum, budaya, etika, dan identitas. ▪ Di perdesaan terjadi budaya kosmopolitan. ▪ Etika teknologi dan free flow: kebutuhan vs hasrat bebas; kepentingan dan hak publikasi; kemanusiaan vs bebas peliputan. ▪ Internet: <i>disembedded, unlimited of time, of role and of content.</i> ▪ Krisis komunikasi internet: <i>back hold</i>, rumor, dan bias informasi. ▪ <i>Embedded journalism: Gulf War</i> dan Perang Aceh. ▪ <i>Political Economic</i>: bisnis informasi-komunikasi yang menguntungkan sekelompok orang-orang di dunia (Bill Gates). ▪ <i>Cultural imperialism place the media: TV, Film, Radio, Print Journalism, Advertising—at the centre of things</i> (McQuail, 2002).

PBB, perwakilan Dunia Ketiga memandang bahwa sebelum terbentuknya NWICO, telah terjadi ketimpangan pemberitaan internasional. Perdebatan di PBB mencapai puncaknya saat dikeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 tentang Tata Ekonomi Dunia Baru (*New World*

Keberatan Dunia Ketiga terhadap NWICO tercermin dari empat kesimpulan yang dikemukakan oleh Dr. Hamid Mowlana (1986) dari the American University di Washington DC, dalam Dennis & Merril (1991) sebagai berikut:

1. Most international news flows from the de-

-
- veloped (the West/the North) to the developing nations (the Third/the South);
 2. Proximity—physical, psychological, and political—is a major factor in news coverage throughout the world;
 3. The United States and Western Europe receive the largest amount of coverage, followed by the socialist countries and the Third World;
 4. Vertical flow of information (North to South) is the dominant flow pattern of the world (1986).

Dalam studi komunikasi internasional yang didasarkan pada NWICO, proses globalisasi media massa dan informasi membawa beberapa fenomena internasional, antara lain, menipisnya batas sistem komunikasi (termasuk sistem pers antarnegara), budaya komunikasi dan hukum komunikasi. Kemudian memunculkan teks-teks baru dalam kajian komunikasi internasional seperti era informasi-komunikasi, banjir informasi, atau masyarakat komunikasi.

Selain itu, ada kecenderungan globalisasi yang menghasilkan media massa internasional dominan, yang pada umumnya dari media AS dan Uni Eropa, seperti *Reuters*, *VOA*, *AFP*, *BBC*, atau *CNN*. Globalisasi juga telah menciptakan keseragaman pemberitaan dan preferensi peliputan, berupa keseragaman masyarakat dunia (*audience agenda*). Peliputan kejadian cenderung seragam (*media agenda*). Interdependensi pemberitaan antar media dunia, seperti *Reuters*, *CNN*, *KBN Antara*, *TVRI*, *RCTI*, atau *Kantor Berita Barnama* Malaysia. Muncul fenomena media cetak cepat melalui jaringan telepon, komputer, atau cetak jarak jauh (Muis, 2001).

Sebagai konsekuensi teknis dari inovasi teknologi komunikasi dan informasi membawa dampak pada pergeseran konsep dalam ilmu komunikasi yang sudah mapan. Dalam dunia jurnalistik ada konsekuensi teknis bagi konsep jurnalistik. Muncul perdebatan kembali konsep proksimitas yang memiliki makna kedekatan geografis tidak lagi imperatif oleh faktor jarak. Semua tempat di dunia bisa dikatakan *dekat* dengan redaksi media. Hal ini, akhirnya, memunculkan istilah proksimitas global yang

mencakup proksimitas kultural, politis, psikologi, dan sosiologis.

Proses globalisasi juga mendorong budaya kosmopolitan dalam alam kehidupan masyarakat perdesaan, seperti penggunaan telepon genggam, VCD, dan alat-alat publik lainnya. Menipisnya batas komunikasi, hukum, budaya, etika, dan identitas. Meluasnya budaya imperialisme media massa, seperti TV, film, radio, atau media cetak (McQuail, 2002). Muncul kajian etika teknologi informasi-komunikasi, yang mempertanyakan, “apakah sebenarnya yang dipenuhi adalah kebutuhan informasi atau hasrat mengakses informasi sebebas-bebasnya.” Juga isu tentang kebutuhan informasi publik *versus* hak media untuk mempublikasi, atau isu kemanusiaan *versus* tugas peliputan (Agee, 1982; Hiebert, 1985).

Dampak kebebasan komunikasi, terutama inovasi teknologi yang melahirkan internet mengakibatkan krisis informasi berupa *back hold* informasi (menahan informasi), rumor, dan bias informasi internet. Hal ini disebabkan ciri-ciri pokok penggunaan internet, antara lain, ketidakterbatasan waktu (*unlimited of time*), *disembedded*, dan ketidakterbatasan isi pesan internet atau *unlimited of content* (Bacher, 2002). Juga kajian dalam perspektif *political economy* mengenai pertumbuhan pesat bisnis informasi yang sebenarnya hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu di negara maju, seperti Bill Gates. Fenomena terakhir adalah konsep *embedded journalism* dalam perang Irak. Dalam hal ini, peliputan media menafikan korban masyarakat sipil dalam perang, karena jurnalis bergerak mengikuti pasukan yang memenangkan peperangan.

5.2 Kontribusi Media Barat pada Keseimbangan Informasi-Komunikasi Global

Berbeda dengan perspektif dominasi informasi-komunikasi global oleh AS dan Uni Eropa, perspektif yang berlawanan adalah memandang media AS dan Uni Eropa dalam globalisasi telah memberikan kontribusi terhadap keseimbangan informasi-komunikasi global. Salah

satu asumsi pokok perspektif ini, bahwa globalisasi merupakan penyebaran menuju keseimbangan informasi-komunikasi dan kebudayaan secara internasional (lihat Bagan 4).

ketidakmampuan negara berkembang untuk membangun *freedom of press*. Di berbagai negara berkembang terjadi banyak pembatasan, pengekangan, oleh rezim politik suatu negara

Bagan 4. The US Media Contribute Fairly to Communication Equity (Dennis, et al., 1991)

1. Perspektif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontribusi Media Barat untuk Keseimbangan Global
2. Landasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matematika dan Ilmu-Ilmu Sosial ▪ Teknologi
3. Lokus/Fokus/Isu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran (Media, Teknologi dan Budaya). ▪ <i>Free Flow of Information and Communication as a Myth.</i> ▪ Penyebaran dan keseimbangan informasi, komunikasi dan kebudayaan. ▪ <i>An imbalance of resources in the world.</i> ▪ <i>The US has an extraordinary advantage.</i>
4. Teori/Model/Proposisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandangan tentang dominasi media global lebih sebagai ketidakmampuan membangun freedom of press; ▪ Masuknya industri dan teknologi informasi dari Utara ke Selatan, sebab Utara diundang Selatan, bukan spirit imperialisme; ▪ Negara Dunia III sudah memperoleh keuntungan dari free flow of information and communication; ▪ Sudah terjadi transfer teknologi yang bermanfaat bagi negara Dunia III; ▪ Ketidakseimbangan sistem informasi-komunikasi global disebabkan entrepreneurial spirit and media maturity, terutama US; ▪ Globalisasi memunculkan negara-negara alternatif: India-Cina, Inggris-Rusia, Uni-Eropa, dsb; ▪ Kegagalan Dunia III disebabkan: a. <i>Information is no solution for a lack of resources</i>, b. <i>Audience for information programs are unresponsives even when such information might help</i>, c. <i>Information programs have not worked because they have not been done appropriately</i>;
5. Objek Studi/Kajian/Konteks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Media global alternatif: <i>Aljazeera, BBC</i>, dsb. ▪ Pertukaran budaya, teknologi dan bisnis pariwisata. ▪ Penyebaran nilai demokrasi (demokratisasi). ▪ Konvergensi teknologi informasi dan komputer. ▪ Serangan globalisasi memunculkan <i>counter of trend</i>. ▪ Diversifikasi ketokohan opini (dunia). ▪ Kekuatan budaya dari berbagai belahan dunia: Cina, Jepang, Taiwan, Malaysia, dsb.

Proposisi-proposisi yang dikemukakan kubu optimis ini mencakup. *Pertama*, tuding dominasi media global oleh negara maju, lebih sebagai

terhadap aktivitas jurnalistik dalam melakukan pemberitaan dalam negeri. Meskipun sebagian negara berkembang sudah mengalami kemajuan

dalam menjaga iklim kebebasan informasi-komunikasi domestiknya.

Kedua, membanjirnya teknologi dan industri informasi-komunikasi dari negara Utara ke negara Selatan, bukan dikarenakan semangat imperialisme untuk menguasai pasar teknologi dunia, tetapi disebabkan oleh kebutuhan teknologi negara Selatan. Ada kebijakan negara Selatan untuk mengundang masuk produksi teknologi informasi-komunikasi tersebut.

Ketiga, praktik kebebasan informasi-komunikasi global, banyak menguntungkan Dunia Ketiga. Keuntungan dalam penerapan teknologi untuk kemajuan negara, pertukaran ilmu pengetahuan, keuntungan ekonomi dan pertukaran kebudayaan.

Keempat, pemenuhan kebutuhan teknologi informasi-komunikasi Dunia Ketiga, telah dibarengi proses transfer teknologi dari negara maju, yang sangat dibutuhkan bagi modernisasi negara berkembang (Soesanto, 1982). Hal ini dibuktikan oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Cina untuk membangun industri raksasa di bidang informasi-komunikasi.

Kelima, ketidakseimbangan sistem informasi-komunikasi internasional merupakan hasil dari *entrepreneurship* yang kuat dan kematangan sistem media massa negara AS dan Uni Eropa. Sejarah perkembangan media Eropa Barat dan AS telah mengalami pengalaman panjang. Teori media massa juga dilahirkan dari fenomena media Eropa Barat dan AS. Juga tipologi sistem pers, lebih mencerminkan kondisi Eropa Barat dan AS. Setelah itu, tipologi Uni Soviet dan Eropa Timur, dan kemudian fenomena media negara berkembang.

Keenam, globalisasi media dan arus informasi-komunikasi telah menunjukkan gejala baru, tidak lagi terpaku pada struktur global yang statis. Muncul aliansi baru negara-negara di luar *mainstream* dalam pemilikan dan kontrol sistem media dunia. contoh, negara baru di Eropa Timur pasca jatuhnya Tembok Berlin, kerjasama India-Cina, dan Inggris-Rusia. Semua menunjukkan fenomena baru hasil globalisasi yaitu arus informasi-komunikasi internasional baru.

Ketujuh, kegagalan dan kelemahan negara

berkembang dalam komunikasi internasional, menurut Hornik (1988), adalah: (a) informasi tidak menjadi solusi atas kekurangan sumber daya; (b) masyarakat tidak responsif dalam program informasi, bahkan ketika informasi memungkinkan memberi bantuan; (c) program informasi tidak berjalan, karena tidak terkait dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya (Dennis & Merrill, 1991).

Perkembangan positif lainnya, fenomena komunikasi internasional yang terkait dengan peran media global, telah melahirkan media tandingan. Satu contoh adalah stasiun televisi *Aljazeera*, Qatar, yang menunjukkan kredibilitas dalam peliputan perang Irak, ketika AS dan sekutu menginvasi Irak untuk menggulingkan Saddam Husein. Padahal, sebagian besar awak televisi *Aljazeera* adalah alumni *BBC* London. Penyebaran budaya populer (*pop culture*) tidak didominasi oleh budaya Barat, tetapi muncul dari Taiwan, Korea Selatan, atau Jepang. Globalisasi pun telah menimbulkan diversifikasi ketokohan opini, dari negara-negara berkembang pada tingkat dunia. Globalisasi juga melahirkan budaya tandingan (*counter culture*) secara politik dan ekonomi, pada tahap tertentu seperti negara Timur Tengah, Cina, dan Malaysia.


Kerjasama budaya terus meningkat. Kunjungan misi kebudayaan, pameran kebudayaan seperti lukisan, ukiran, patung atau karya seni lainnya telah menciptakan pertukaran kebudayaan (*cultural exchange*). Dalam arti luas, kerjasama kebudayaan mencakup kerjasama pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, bidang penelitian dan pengajaran yang akan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, bangsa yang memiliki kepercayaan diri dan keyakinan mendalam atas kebudayaannya, akan menyebarluaskan, berkomunikasi dan memberikan sumbangan nyata dalam komunikasi internasional (Soesanto, 1982).

Komunikasi internasional telah mendorong demokratisasi di berbagai belahan bumi ini. Komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi, melekat pada konsep demokrasi itu sendiri. Naik turunnya demokrasi sangat tergantung pada struktur dan ciri dari sistem

komunikasi. Tolok ukur demokrasi adalah kriteria komunikasi, yakni adanya wacana publik, pertukaran pendapat, gagasan, dan perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak dibatasi (kebebasan pers), serta hak dan kebebasan untuk memilih. Arus informasi-komunikasi internasional dan percepatan teknologi telah mendorong demokratisasi antarnegara (Dahlan, 2000).

6. Implikasi, Kajian, dan Penelitian ke Depan

Implikasi studi komunikasi internasional ke depan meliputi fenomena komunikasi yang sangat kompleks: (1) Studi pergeseran paradigma komunikasi pembangunan (Winangsih-Syam, 2002); (2) Kajian paradoksal komunikasi internasional, yang di satu sisi menyebarkan diversitas kultur, nilai, dan identitas, dan di sisi lain mempromosikan budaya kosmopolitan (McPhail, 1989); (3) Studi pergeseran definisi komunikasi dan informasi seperti: proksimitas, teknologi, *news, feed back*, dsb; (4) Studi dampak *free flow of information and communication* secara sosial, kultural, hukum politik, ekonomi dan pilihan teknologi. (5) Pengujian konsep informasi sebagai *market commodity* atau *social goods*; (6) Studi tentang *broadcast satelites, global television, the electronic newspaper, telecommunications, technology, information and communication regulation, traffics, standardization, transborder data flows, the information society, information good or services, information communication trade, deregulation and public policy, dan democratization of communication* (Asante & Gudykunst, 1989); (7) Studi perspektif ekonomi-politik untuk meneliti bisnis informasi-komunikasi (Kuntjorojakti, 1990; Mosco, 1996); (8) Penelitian tentang keseimbangan teknologi informasi-komunikasi dalam tiga pendekatan: *Dystopian, Neofuturis*, dan *Teknoreal* (Ispandriarno, *et al.*, 2002); (9) Studi *interactionism symbolic* untuk menemukan kreatifitas manusia global (Lull, 1997); (10) Penelitian *a team based approach using interdisciplinary resources*; (11) Studi tentang krisis komunikasi dalam bidang: militer, politik,

ekonomi, sosial dan kebudayaan (Ispandriarno, *et al.*, 2002). 

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2000. *Ekonomi Politik Pembangunan: Suatu Pengantar*. Penerbit Dialog Press. Bandung.
- Aly, Bachtiar. 1996. *Direktori Komunikasi*. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Panitia Pelaksana Pusat Konggres III. Seminar Nasional Ilmu Komunikasi. Jakarta.
- Asante, Molefi Kete & William B. Gudykunst. 1989. *Handbook of International and Intercultural Communication*. SAGE Publications, Inc. Newbury Park. California.
- Dahlan, Alwi. 2000. "Teknologi dan Pengembangan Demokrasi". Jurnal. Transformasi. Pusaran Arus Pemikiran Menuju Indonesia Baru. Edisi April 2000. Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Forum Rektor. Bandung.
- Dennis, Everette & John C. Merrill. 1991. *Media Debates: Issues in Mass Communication*. Longman. New York and London.
- Hiebert, Ray Eldon; Donald F. Ungurait & Thomas W. Bohn. 1985. *Mass Media IV: An Introduction to Modern Communication*. New York: Longman.
- Indrapiarno, Lukas; Thomas Hanitzsch dan Martin Loeffelholz. 2002. *Media Militer Politik: Crisis Communication Perspektif Indonesia dan Internasional*. Yogyakarta: Kerjasama Friedrich Ebert Stiftung dan Galang Press.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1990. *Makalah*. "Pendekatan Politik Ekonomi (Political Economy): Jembatan diantara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik". Seminar Sehari Jurnal Ilmu Politik VIII. Kerjasama AIPI-LIPI. 14 Maret 1990. Jakarta.
- Littlejohn, Stephen W. 1989. *Theories of Human Communication*. 4th Edition. Belmont, Albany, Boon, Boston, Cincinnati, Detroit, London, Madrid, Melbourne, Mexico City, New

- York, Paris, San Fransisco, Singapore, Tokyo, Toronto, Washington: Wadsworth Publishing Company and An International Thomson Publishing Company.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. 5th Edition. Belmont, Albany, Boon, Boston, Cincinnati, Detroit, London, Madrid, Melbourne, Mexico City, New York, Paris, San Fransisco, Singapore, Tokyo, Toronto, Washington: Wadsworth Publishing Company and An International Thomson Publishing Company.
- Lull, James. 1998. *Media, Komunikasi dan Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*. Diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Malik, Dedy Djamaluddin, Jalaluddin Rakhmat, dan Muhammad Shoelhi. (ed.) 1993. *Komunikasi Internasional*. Bandung: Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan Komunikasi (LP3K) dan PT Remaja Rosdakarya.
- McNair, Brian. 1999. *An Introduction to Political Communication*. 2nd Edition. London and New York: Routledge.
- McQuail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- McQuail, Denis. 2002. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London., Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, Inc.
- Miller, Khaterine. 2002. *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts*. Boston, Burr Ridge, IL, Dubuque, IA, Madison, WI, New York, San Fransisco, St. Louis, Bangkok, Bogota, Caracas Kuala Lumpur, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto: McGrawHill.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. SAGE Publications, Inc. London. Thousand Oaks. New Delhi.
- Muis, Abdul. 2001. *Indonesia di Era Dunia Maya: Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2003. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Edisi 7. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sastropetro, R.A. Santoso. 1991. *Komunikasi Internasional: Sarana Interaksi Antarbangsa*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Stacks, Don W., Sidney R. Hill Jr, & Mark Hickson III. 1991. *An Introduction to Communication Theory*. Holt, Rinehart and Winston, Inc. Fort Worth. Chicago. San Fransisco. Philadelphia. Montreal. Toronto. London. Sydney. Tokyo.
- Soesanto, Astrid S. 1982. *Komunikasi Kontemporer*. Edisi 2. Penerbit Bina Cipta. Jakarta.
- Winangsih-Syam, Nina. 2002. "Rekonstruksi Ilmu Komunikasi, Perspektif Pohon Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan dalam Era Globalisasi". *Pidato*. Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Padjadjaran. 11 September 2002. Diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Wolhelm, Anthony G. 2003. *Demokrasi di Era Digital: Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*. Diterjemahkan oleh N. Veraningtyas. Kerjasama Penerbit Pustaka Pelajar dengan Center for Critical Social Studies (CCSS).

